

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KARO 2021



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KARO 2021



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KARO 2021

ISBN :
Katalog BPS : 4102004.1211
No. Publikasi : 12110.2125
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 54 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

TIM PENYUSUN

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KARO

2021

Penanggung Jawab Umum

Yustinus Sembiring, SE.MM

Koordinator

Penanggung Jawab Teknis

Hendra P. Tondang, S.ST, M.M

Editor

Hendra P. Tondang, S.ST, M.M

Penulis

Quarthano Reavindo, S.Si

Infografis

Tetty Florentina Br. Bukit, S.Tr. Stat

Kata Pengantar

Publikasi ini menyajikan indikator-indikator yang menggambarkan kondisi kesejahteraan rakyat yang mencakup aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan, pola konsumsi, kemiskinan, pembangunan manusia, ketenagakerjaan, dan perumahan. Sumber data yang digunakan adalah data hasil pengolahan Susenas, Sakernas, Sensus Penduduk serta data sekunder dari dinas terkait.

Publikasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai aspek kesejahteraan rakyat di Kabupaten Karo sehingga dapat menjadi dasar dan acuan untuk menentukan arah kebijakan serta sebagai alat penilaian dan pemantauan terhadap pencapaian program pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Karo,

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pemikirannya sehingga publikasi ini dapat terwujud. Akhirnya semua kritik dan saran, sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang.

Berastagi, Desember 2021

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Karo



Yustinus Sembiring, SE, M.M

Daftar Isi

v	Kata Pengantar
vii	Daftar Isi
ix	Daftar Tabel
xi	Daftar Gambar

1 Pendahuluan

1	3	Latar Belakang
	3	Tujuan
	4	Sumber Data
	4	Sistematika Penyajian

5 Metodologi

2	7	Kependudukan
	8	Kesehatan
	8	Pendidikan
	9	Ketenagakerjaan
	10	Taraf dan Pola Konsumsi
	10	Perumahan

13 Kependudukan

3	16	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
	17	Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>)

19 Kesehatan

4	21	Angka Kesakitan (<i>Morbidity Rate</i>)
	23	Penolong Kelahiran

25 Pendidikan

5	28	Angka Partisipasi Sekolah
	30	Angka partisipasi Murni
	31	Angka Buta Huruf

33

6

Ketenagakerjaan

- 36 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
- 37 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- 37 Pandemi Covid-19 dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Karo

39

7

Taraf dan Pola Konsumsi

- 41 Pengeluaran Rumahtangga

43

8

Perumahan

- 46 Kondisi Rumah Tinggal
- 47 Fasilitas Rumah Tinggal

51

9

Kemiskinan

- 53 Perkembangan Penduduk Miskin

<https://karokab.bps.go.id>

Daftar Tabel

- 3** ¹⁷ Tabel 3.1. Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Karo, 2021
- 4** ²³ Tabel 4.1. Angka Kesakitan dan Persentase Penduduk di Kabupaten Karo yang Berobat Jalan, 2021
- 5** ³¹ Tabel 5.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA Kabupaten Karo Menurut Jenis Kelamin, 2021
- 5** ³² Tabel 5.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Buta Huruf Menurut Kelompok Kepandaian Membaca dan Menulis, dan Jenis Kelamin, 2021
- 6** ³⁶ Tabel 6.1. Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2019-2021
- 7** ⁴² Tabel 7.1. Pengeluaran/Kapita/Bulan dan Persentase Pengeluaran/Kapita/Bulan Penduduk Kabupaten Karo, 2016-2021
- 8** ⁴⁷ Tabel 8.1. Kondisi Fasilitas Rumah di Kabupaten Karo, 2021
- 8** ⁴⁸ Tabel 8.2. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama yang Dignakan Untuk Memasak, Mandi, Cuci, dll di Kabupaten Karo, 2021

9

54

Tabel 9.1. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Karo, 2020- 2021

<https://karokab.bps.go.id>

Daftar Gambar

- 4** ²⁴ Gambar 4.1. Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2021
- 5** ²⁹ Gambar 5.1. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Karo, 2017-2021
- 6** ³⁷ Gambar 6.1. Jumlah Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Karo yang Terdampak Covid-19, Agustus 2020
- 8** ⁴⁶ Gambar 8.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Kabupaten Karo, 2021
- 8** ⁴⁹ Gambar 8.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Karo, 2021
- 9** ⁵⁴ Gambar 9.1. Trend Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karo, 2003-2021

BAB 1

PENDAHULUAN



KESEHATAN



PENDIDIKAN



KETENAGAKERJAAN



KEMISKINAN

KONSUMSI

PERUMAHAN

1 Pendahuluan

Latar Belakang

Pembangunan bangsa merupakan komitmen seluruh Bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara eksplisit pembangunan bangsa telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, politik dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan merupakan komitmen seluruh bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Perencanaan, implementasi dan evaluasi hasil pembangunan, akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan data dan informasi statistik yang baik. Berdasarkan data dan informasi yang dikemas melalui suatu indikator makro, perencanaan pembangunan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berlandaskan pola pikir demikian, diperlukan gambaran mengenai kondisi lapangan mengenai indikator kesejahteraan rakyat untuk melihat berbagai indikator keluaran pembangunan.

Tujuan

Penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi setiap aspek kesejahteraan rakyat di Kabupaten Karo. Indikator ini dapat dijadikan sebagai kompas yang tepat untuk memonitor pencapaian kesejahteraan rakyat.

Melalui analisis Indikator Kesejahteraan Rakyat, perencana dan pelaksana maupun pengamat mendapatkan input mengenai kondisi berbagai dimensi kehidupan yang ada sebagai hasil dan target pembangunan di masa mendatang. Selanjutnya, rencana maupun kebijakan yang disusun diharapkan akan semakin efektif dan efisien, utamanya untuk melaksanakan suatu aksi nyata terhadap suatu kondisi berdasarkan indikator-indikator yang ada. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyusunan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan.

Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data primer Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari sensus dan survei, yaitu Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan kerja Nasional (Sakernas) dan survei lainnya yang telah dilaksanakan.

Sistematika Penyajian

Penyajian data dan analisis dalam dokumen ini dikelompokkan ke dalam sembilan bagian, yaitu:

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data dan sistematika penyajian publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karo 2021.

Bagian kedua berisi penjelasan teknis yang berisi konsep definisi yang digunakan. Selanjutnya, penyajian aspek kependudukan yang mencakup jumlah/pertumbuhan penduduk dan kepadatan/penyebaran penduduk disajikan pada bagian ketiga. Bagian keempat publikasi ini memaparkan kondisi kesehatan yang mencakup status kesehatan penduduk dan indikator makro kesehatan lainnya, kemudian dilanjutkan pembahasan kondisi pendidikan di Kabupaten Karo dari sisi kualitas pendidikan penduduk pada bagian lima. Aspek ketenagakerjaan dibahas pada bagian enam. Aspek taraf dan pola konsumsi serta perumahan akan dibahas pada bagian tujuh dan delapan. Pembahasan ditutup dengan penyajian Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karo 2021 pada aspek kemiskinan yaitu pada bagian sembilan.

BAB 2

METODOLOGI



2 Metodologi

Kependudukan

- Tipe daerah, penentuan suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan berdasarkan indikator komposit (indikator gabungan) yang terdiri dari: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga tani, dan jumlah fasilitas perkotaan.

Variabel kepadatan penduduk mempunyai skor antara 1-8, nilai satu adalah desa dengan kepadatan kurang dari 500 orang per km², nilai dua adalah desa dengan kepadatan antara 500-1.249 orang per km², dan seterusnya sampai dengan nilai delapan yaitu desa dengan kepadatan lebih besar atau sama dengan 8.500 orang per km².

Skor persentase rumah tangga pertanian berkisar antara 1-8. Nilai satu jika desa tersebut memiliki 70 persen atau lebih rumah tangga pertanian, nilai dua jika 50-69,99 persen, dan seterusnya sampai dengan 8, jika desa mempunyai 5 persen rumah tangga pertanian atau kurang.

Skor untuk jenis fasilitas perkotaan adalah 1 dan 0. Desa-desa yang tidak memiliki fasilitas perkotaan namun jaraknya masih relatif dekat atau mudah mencapainya maka desa tersebut dianggap setara dengan desa yang memiliki fasilitas dan diberi skor 1.

Jumlah nilai dari ketiga variabel tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Desa dengan nilai gabungan mencapai 10 atau lebih digolongkan sebagai desa perkotaan sedangkan desa dengan skor maksimum 9 dikategorikan sebagai perdesaan.

- Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.
- Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi.
- Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.
- Peserta keluarga berencana (akseptor) adalah orang yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi.

- Akseptor aktif adalah orang yang pada saat ini memakai metode kontrasepsi untuk penjarangan kehamilan.
- Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun.

Kesehatan

- Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau lainnya. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.
- Konsultasi adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk membicarakan masalah kesehatan, termasuk konsultasi KB dan konsultasi ke dokter.
- Rawat jalan atau berobat jalan adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien, membeli obat atau melakukan pengobatan sendiri. Rawat inap adalah kegiatan atau upaya responden yang mengalami keluhan kesehatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan dan harus menginap.
- Angka Harapan Hidup adalah rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir pada suatu daerah.

Pendidikan

- Sekolah adalah kegiatan belajar di sekolah formal dan non formal (Paket A, B, dan C) mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.
- Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- Masih bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
- Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah bersekolah tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.
- Tamat sekolah adalah menyelesaikan pendidikan pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan yang pernah diikuti (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diikuti oleh seseorang yang masih sekolah.

- Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.
- Dapat membaca dan menulis adalah mereka yang dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan sesuatu huruf. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).
- Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis.
- Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
- Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Ketenagakerjaan

- Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun untuk sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja bebas profesional seperti dukun dan dalang). Disamping itu termasuk pula dalam pengangguran yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan/usaha tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, sudah diterima kerja namun belum mulai bekerja dan juga mereka yang sudah merasa putus asa dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja dan mencari kerja.
- Kegiatan yang terbanyak dilakukan adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibanding dengan kegiatan lainnya.
- Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara berturut-turut dan tidak terputus dalam satu minggu, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi.

- Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena suatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan mogok.
- Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja.
- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha (sebagai pengusaha), buruh/karyawan, atau pekerja keluarga tidak dibayar.
- Jam kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).
- Penduduk yang menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan termasuk menunggu pekerjaan bagi yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

Taraf dan Pola Konsumsi

- Konsumsi/pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk kebutuhan (konsumsi) semua anggota rumah tangga. Secara umum pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan (pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau) dan bukan makanan (pengeluaran untuk perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak dan pesta)
- Konsumsi rata-rata per kapita setahun, diperhitungkan dari konsumsi rata-rata per kapita dalam seminggu dikalikan dengan $30/7 \times 12$.
- Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan, mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dikonsumsi di luar rumah, termasuk minuman, tembakau dan sirih dalam jangka waktu sebulan.

Perumahan

- Bangunan fisik adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri.

- Luas lantai adalah luas lantai dari bangunan tempat tinggal atau jumlah dari setiap bagian tempat tinggal yang ditempati oleh anggota rumah tangga dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
- Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.
- Atap adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami dibawahnya dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
- Sumber Air Minum Bersih adalah sumber air minum yang berasal dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 m.
- Sumber Air Minum Layak adalah sumber air minum yang berasal dari leding, air hujan, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 m.
- Akses air layak adalah sumber air minumnya terdiri leding, air hujan, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung, serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat \geq 10 m] dan sumber air minum kemasan/air isi ulang dimana sumber air cuci/masak/mandi/dll menggunakan (sumur bor/pompa, sumur terlindung, serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat \geq 10 m.
- Air leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).
- Air sumur/mata air terlindung adalah bila lingkaran mulut sumur/mata air tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan
- sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut/perigi.

BAB 3

KEPENDUDUKAN



Jumlah penduduk
Kabupaten Karo

404.998 jiwa

SEX RATIO

98,87



Setiap 100 penduduk Perempuan terdapat
98 penduduk laki-laki

3 Kependudukan

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

Untuk itu aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam angka meningkatkan kesejahteraan penduduk seperti: arus migrasi, angka kelahiran dan kematian. Ketiga komponen ini turut serta dalam perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan politik serta pertahanan.

Data kependudukan sangat dibutuhkan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dari data kependudukan dapat dibuat berbagai perencanaan kebutuhan fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, dan fasilitas lainnya. Data kependudukan yang

terkait diantaranya data tentang jumlah penduduk, kepadatan, dan penyebaran penduduk serta data struktur umur penduduk.

Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk, penduduk Kabupaten Karo pada tahun 2020 sebanyak 404.998 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 200.247 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 204.751 jiwa. Pada tabel 3.1. ditampilkan jumlah penduduk Kabupaten Karo menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2020. Penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) masih mendominasi komposisi penduduk Kabupaten Karo pada tahun 2021, yaitu sebesar 65,86 persen.

Dengan melihat persentase tersebut, permasalahan kependudukan di Kabupaten Karo perlu mendapat perhatian yang cukup serius. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesejahteraan penduduk merupakan suatu upaya yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinergis dengan program-program pembangunan lainnya yang dilaksanakan.

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Besar kecilnya rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh pola mortalitas dan migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut. Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Karo umumnya selalu lebih banyak dari penduduk laki-laki, yang diperlihatkan melalui rasio jenis kelaminnya. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 diketahui sex ratio Kabupaten Karo sebesar 98,87 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki.

Tabel 3.1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Karo, 2020

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (<i>jiwa</i>)		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	
0 -14	54 084	52 046	106 130
15 - 64	135 816	136 779	272 595
65 +	10 347	15 926	26 273
Total	200 247	204 751	404 998

Sumber: Sensus Penduduk, 2020

Rasio Ketergantungan

Masalah kependudukan lainnya yang cukup serius adalah masih timpangnya persentase penduduk antar kelompok umur, sehingga beban tanggungan penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) masih cukup besar. Oleh karena itu, rasio ketergantungan harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Tahun 2020, dengan melihat hasil Sensus Penduduk, maka diperoleh rasio ketergantungan sebesar 48,57 yang berarti setiap seratus orang usia produktif menanggung 49 orang dari usia dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas. Beban tanggungan anak bagi usia produktif sebesar 39 dan beban tanggungan lanjut usia bagi penduduk usia produktif sebesar 10.

BAB 4

KESEHATAN



Angka Kesakitan Kabupaten Karo

6,64 persen

4 Kesehatan

Sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seorang dalam melakukan aktivitasnya.

Bangsa yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Oleh sebab itu kesehatan menjadi salah satu aspek kesejahteraan dan menjadi fokus utama pembangunan manusia. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata karena memang salah satu hak dasar rakyat adalah mendapat pelayanan kesehatan.

Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta peningkatan pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat serta sarana penunjangnya terus dilakukan oleh Pemerintah, seperti Puskesmas, Posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang digiatkan pemerintah diharapkan dapat berakselerasi positif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di antaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

Angka kesakitan (Morbidity Rate)

Tingkat kesakitan/morbiditas didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam sebulan yang lalu atau mengalami sakit. Tingkat kesakitan ini selain secara umum, dapat juga keluhan menurut jenis penyakit.

Pada tahun 2021 angka kesakitan Kabupaten Karo sebesar 6,64 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, umumnya pada tahun 2021 perempuan lebih banyak menderita sakit yaitu sebesar 7,22 persen sedangkan laki-laki sebesar 6,06 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat morbiditas di Kabupaten Karo yang berfluktuatif. Tingkat morbiditas pada tahun 2021 merupakan yang terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sedangkan tingkat morbiditas tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 16,27 persen.

Berbagai upaya dilakukan penduduk untuk menjaga kesehatan, baik secara mandiri maupun oleh keluarganya yang masih sehat. Upaya menjaga kesehatan yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan berobat sendiri, berobat jalan, maupun rawat inap. Berobat sendiri merupakan upaya mengobati penyakit atas inisiatif sendiri, berdasarkan pengetahuan kesehatan yang dimilikinya secara mandiri. Berobat jalan/ rawat jalan adalah melakukan konsultasi kesehatan kepada tenaga ahli kesehatan yang dipercaya, dengan cara mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern maupun tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Adapun rawat inap adalah proses penyembuhan penyakit yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang mendukung, dibawah pendampingan dan pengawasan petugas kesehatan yang kompeten. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya cara berobat dengan mengobati sendiri sebenarnya tidak direkomendasikan.

Berdasarkan Tabel 4.1. diketahui bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan kemudian berobat jalan untuk mengobati sakitnya dengan menggunakan jaminan kesehatan adalah sebesar 26,68 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, umumnya pada tahun 2021 perempuan lebih banyak yang berobat jalan menggunakan jaminan kesehatan, yaitu sebesar 30,67 persen sedangkan laki-laki sebesar 22,30 persen.

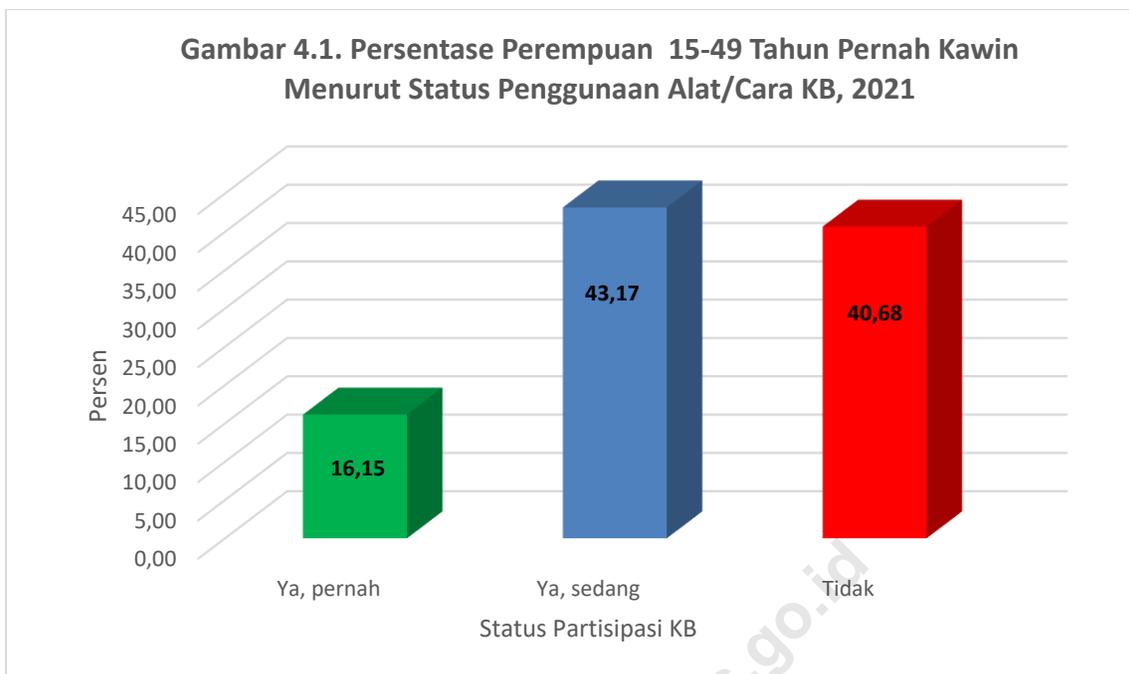
Tabel 4.1. Angka Kesakitan dan Persentase Penduduk di Kabupaten Karo yang Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan, 2021

Jenis Kelamin	Angka Kesakitan	Persentase penduduk yang rawat jalan menggunakan jaminan kesehatan
(1)	(2)	(3)
Laki-Laki	6,06	22,30
Perempuan	7,22	30,67
LK + PR	6,64	26,68

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2021

Penolong Kelahiran

Salah satu unsur yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dan aman jika dibanding ditolong oleh bukan tenaga medis seperti dukun, famili atau lainnya. Penanganan kelahiran bayi yang kurang baik dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi yang dilahirkan seperti pendarahan, kejang-kejang atau situasi yang lebih berbahaya dapat mengakibatkan kematian pada bayi atau si ibu. Dalam dua tahun terakhir menurut penolong kelahiran terakhir, pada tahun 2021 perempuan berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin di Kabupaten Karo lebih banyak melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu sebesar 98,84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan kesehatan ibu dan bayi sudah tinggi.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2021

Keluarga Berencana

Upaya penurunan tingkat fertilitas di Kabupaten Karo telah dilakukan cukup lama. Penurunan tersebut masih akan terus berlangsung tetapi dengan kemungkinan yang semakin melambat. Selain karena faktor budaya lokal, pengalaman menunjukkan bahwa penurunan tingkat fertilitas juga dipengaruhi oleh meningkatnya faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, selain dikarenakan program KB, penurunan fertilitas juga disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai yang nantinya akan mempengaruhi umur pada saat perkawinan pertama.

Secara umum, tingkat partisipasi perempuan 15-49 tahun pernah kawin terhadap program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Karo tahun 2021 cukup tinggi, hal ini dapat dilihat pada gambar 4.1 dimana perempuan 15-49 tahun pernah kawin yang sedang menggunakan KB dan pernah menggunakan KB tahun 2021 telah mencapai 43,17 persen dan 16,15 persen. Sedangkan yang tidak menggunakan KB hanya 40,68 persen.

BAB 5

PENDIDIKAN



Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Karo terus mengalami peningkatan



Angka Melek Huruf
Kabupaten Karo

99,58 persen

5 Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran.

Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pada program pembangunan pendidikan nasional yang dilakukan saat ini telah pula mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*) dan *Sustainable Development Goals* (MDGs) yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan sosial dan lainnya.

Untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang suatu kemampuan baik itu dari Pemerintah untuk dapat menyediakan sarana yang memadai dan juga ditunjang dengan kemampuan masyarakat, karena sampai saat ini kemampuan pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis bagi warganya masih belum terlaksana secara optimal.

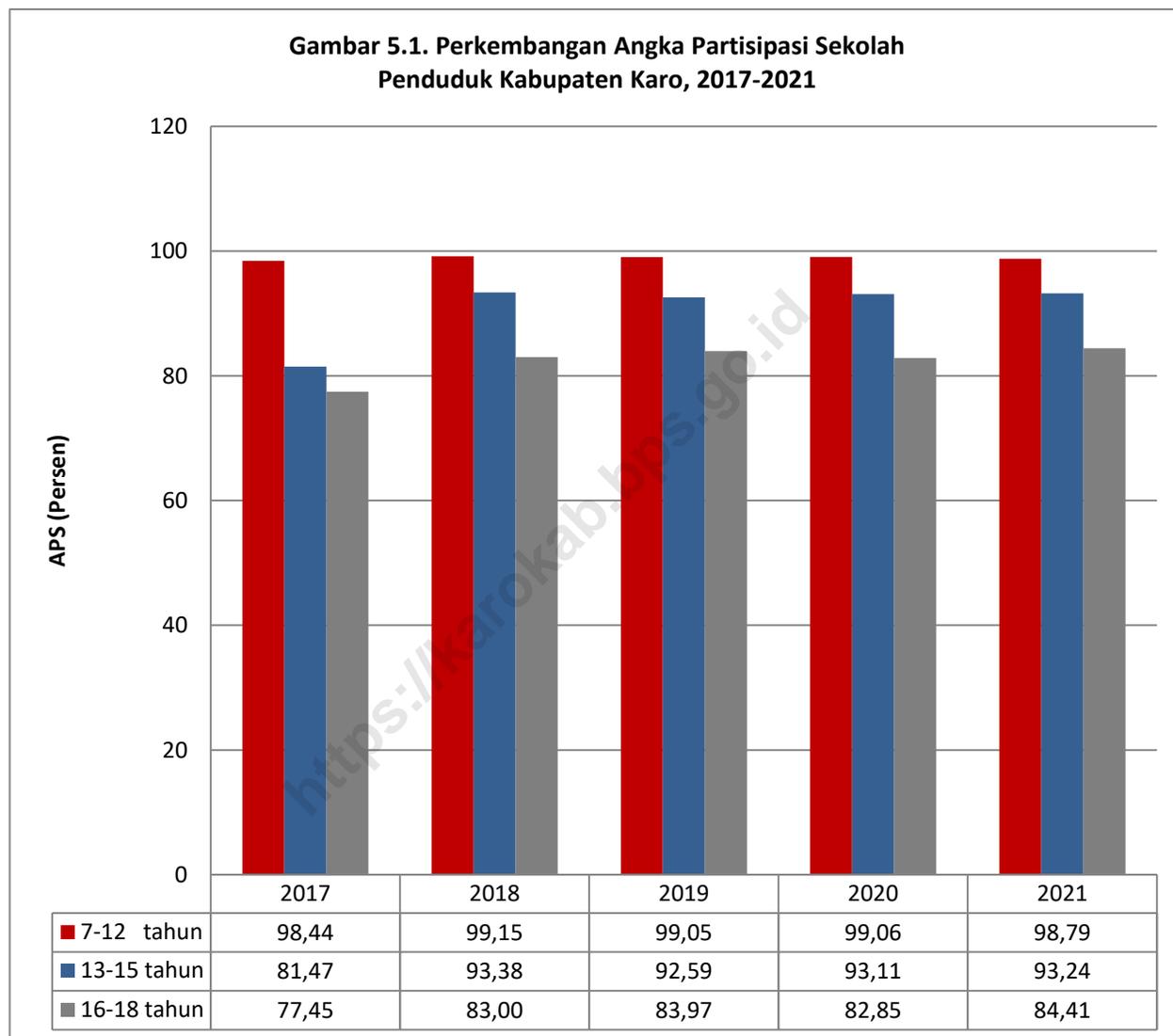
Masih rendahnya kemampuan pemerintah dan masyarakat selalu menjadi kendala dalam dunia pendidikan. Realita ini senantiasa banyak ditemui di sekeliling kita, yaitu banyak sarana pendidikan yang sangat tidak layak dan juga banyak anak-anak usia sekolah seharusnya belajar, namun sudah harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Ditengah keterbatasan inilah pemerintah mencanangkan Program Wajib Belajar Sekolah Dasar enam tahun pada tahun 1984 dan kemudian diikuti dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun mulai tahun 1994. kebijaksanaan lain sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat adalah melalui program di luar pendidikan formal, diantaranya melalui sekolah-sekolah program jarak jauh.

Program atau kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat sekolah. Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan lebih baik dan utamanya tingkat melek huruf terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun).

Angka Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun dan umur 13-15 tahun sebagai pendidikan dasar, 16-18 tahun pada pendidikan menengah. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Pada umumnya, partisipasi pendidikan dasar masih cukup tinggi, dan angka ini akan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator penting dalam pendidikan yang menunjukkan persentase penduduk usia 7-12 tahun yang masih terlibat dalam sistem pendidikan. Adakalanya penduduk usia 7 - 12 tahun belum sama sekali menikmati pendidikan, tetapi ada sebagian kecil dari kelompok mereka yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat SD.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2021

Gambar 5.1. menunjukkan angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Karo tahun 2017-2021, pada setiap kelompok usia terlihat terjadi peningkatan di tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Usia 7-12 tahun meningkat dari 98,44 persen pada tahun 2017 menjadi 98,79 persen pada tahun 2021, pada kelompok usia 13-15 tahun meningkat dari 81,47 persen pada tahun 2017 menjadi 93,24 persen pada tahun 2021. Peningkatan juga terjadi pada kelompok umur 16-18 tahun, pada kelompok umur 16-18 tahun meningkat dari 77,45 persen pada tahun 2017 menjadi 84,41 persen pada tahun 2021.

Angka Partisipasi Murni

Dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan, salah satunya adalah keluhan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah di antaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk dewasa.

Selain APS, indikator pendidikan lain adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Informasi yang diperoleh dari APS tidak memperhitungkan anak pada suatu kelompok yang benar-benar bersekolah pada jenjangnya. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang partisipasi sesuai dengan jejang pendidikan, indikator APM memang lebih relevan. APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur dengan jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Tabel 5.1 menunjukkan bagaimana besaran APM di masing-masing jenjang pendidikan. Terlihat disini bahwa seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, maka nilai APM cenderung semakin berkurang. Tahun 2021, capaian APM SD/Sederajat telah mencapai 98,53 persen. Artinya hampir seluruh anak usia 7-12 bersekolah pada jenjang SD. Terlihat pada gambar, bahwa baik laki-laki maupun perempuan telah menikmati bersekolah di jenjang SD.

APM SMP/Sederajat sebesar 84,89 persen memberikan gambaran bahwa hampir seperlima anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang SMP, bisa masih SD, sudah SMA atau sudah putus sekolah. Capaian APM SMP pada tahun 2021 masih menunjukkan bahwa pendidikan di tingkat SMP belum dirasakan oleh seluruh anak usia 13-15 tahun. APM SMP cenderung lebih besar perempuan daripada laki-laki. Demikian juga dengan APM pada tingkat SLTA/ sederajat tahun 2021 yang hanya sebesar 75,15 persen.

Tabel 5.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA Kabupaten Karo
Menurut Jenis Kelamin, 2021

JENIS KELAMIN	APM		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	98,97	79,64	76,48
Perempuan	98,03	89,53	73,98
Laki-laki + Perempuan	98,53	84,89	75,15

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2021

Angka Buta Huruf

Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf atau tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Kemampuan membaca dan menulis akan mendorong meningkatnya peran aktif penduduk dalam proses pembangunan. Secara persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum dapat membaca dan menulis di Kabupaten Karo dapat dikatakan rendah. Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021, persentase penduduk yang melek huruf sebanyak 99,58 persen dan buta huruf 0,42 Persen.

Tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf dapat di jadikan salah satu indikator tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Selanjutnya tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki akan dapat mendorong penduduk untuk berperan lebih aktif dalam proses pembangunan.

Tabel 5.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Buta Huruf Menurut Kelompok Kepandaian Membaca dan Menulis, dan Jenis Kelamin, 2021

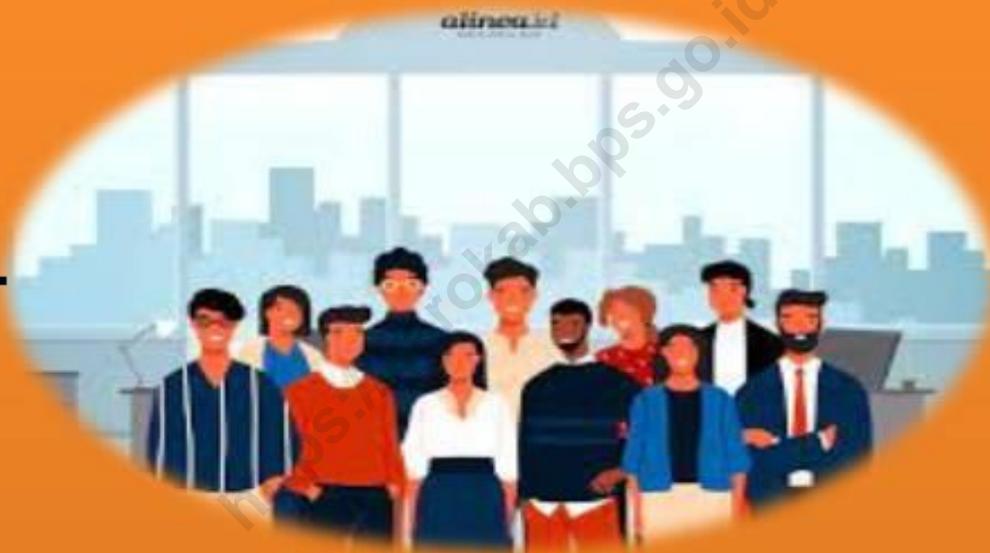
KEPANDAIAN MEMBACA DAN MENULIS	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Huruf Latin/Alfabet	99,89	99,29	99,58
Huruf Arab/Lainnya	8,01	7,69	7,85
Buta huruf	0,11	0,71	0,42

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2021

Jika diperhatikan dari kependaian membaca dan menulis penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang pandai membaca dan menulis huruf latin/alfabet 99,89 persen dan perempuan 99,29 persen. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang pandai membaca dan menulis huruf arab/lainnya, laki-laki sebesar 8,01 persen sedangkan perempuan sebesar 7,69 persen. Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang buta huruf, laki-laki sebesar 0,11 persen dan perempuan sebesar 0,71 persen.

BAB 6

KETENAGAKERJAAN



TPT

Tingkat Pengangguran Terbuka

1,95 persen

TPAK

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

84,56 persen

6 Ketenagakerjaan

Secara teori, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Pada analisis ketenagakerjaan ini digunakan batasan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (economically active) didefinisikan bagian dari tenaga kerja yang benar-benar siap bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Penduduk yang siap bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan pengangguran. Tenaga kerja yang termasuk kedalam bukan angkatan kerja (uneconomically active) adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bersekolah, mengurus rumah tangga, penerima pendapatan (pensiunan) dan lain-lain.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Karo diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat di samping pertambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja.

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Karo dalam bagian ini akan disajikan kondisi ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), dan tingkat pengangguran pada tahun 2020. Selain itu, disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, serta jam kerja.

Tabel 6.1. Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2019-2021

Kegiatan	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan kerja	255 700	262 029	269 889
- Bekerja	252 946	257 236	264 624
- Pengangguran	2 754	4 793	5 265
Bukan Angkatan kerja	49 501	50 174	49.274
Jumlah Penduduk Usia Kerja	305 201	312 203	319 163
T P A K (%)	83,78	83,93	84,56
TPT (%)	1,08	1,83	1,95

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus, 2019 - 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) digolongkan sebagai:

- (i) angkatan kerja, bila mereka bekerja atau mencari pekerjaan, dan
- (ii) bukan angkatan kerja, bila mereka bersekolah, mengurus rumahtangga, dan lainnya.

Pada tabel 6.1 dapat disimpulkan bahwa tahun 2021, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Karo adalah 319.163 orang yang terdiri dari 269.889 angkatan kerja dan sisanya sebanyak 49.274 orang termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja disuatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa TPAK di Kabupaten Karo tahun 2021 sebesar 84,56 persen, artinya bahwa pada tahun 2020 sebanyak 84,56 persen penduduk usia kerja di Kabupaten Karo siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu ukuran pengangguran adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Pengangguran terbuka juga merupakan masalah yang dianggap paling serius untuk diatasi. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2021 di Kabupaten Karo sebesar 1,95 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 tersebut menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karo cukup baik.

Hal ini dapat dipahami bahwa di Kabupaten Karo pada umumnya merupakan daerah pertanian, dan tidak sulit untuk bekerja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Berbeda dengan di perkotaan dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, penduduk usia kerja umumnya lebih selektif untuk mencari pekerjaan, selain karena sudah terbatasnya lahan pertanian.

Pandemi Covid-19 dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Karo



Covid-19 diketahui muncul pertama kali di Wuhan, China, pada Desember 2019. Tanggal 13 Januari 2020, terdapat kasus baru Covid-19 di luar China untuk pertama kalinya. Sedangkan di Indonesia, kasus pertama yang diumumkan Presiden adalah pada tanggal 2 Maret 2020. Selanjutnya, Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 16 Maret 2020. Sejak Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi, Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan Mei 2020. Namun setelah itu, perlahan-lahan kegiatan ekonomi dan social mulai dibuka kembali pada Juni 2020.

Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang menurun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu a) Pengangguran ; b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020; c) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 bagi mereka yang berhenti bekerja.

Berdasarkan grafik 6.1 diatas dapat kita simpulkan bahwa berkurangnya jam kerja adalah dampak Covid-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja, yaitu sebanyak 31.094 orang. Sedangkan jumlah pengangguran karena Covid-19, yaitu pengangguran yang berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus2020 sebanyak 1.562 orang atau sekitar 32,59 persen terhadap total penganggur (4.793 orang) di Kabupaten Karo. Secara umum juga terdapat 188 orang yang sementara tidak bekerja karena Covid-19 dan 608 orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 di Kabupaten Karo, yaitu penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020.

BAB 7

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan



MAKANAN

Rp. 883.498

BUKAN MAKANAN

Rp. 501.286

7 Taraf dan Pola Konsumsi

Pengeluaran Rumah Tangga

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan pada tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga, yang dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, di negara yang relatif sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga. Perubahan angka persentase tersebut dalam setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf hidup rumah tangga.

Salah satu informasi dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran per kapita pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.384.784,-, terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp. 883.498,- dan untuk pengeluaran bukan makanan Rp. 501.286,-. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran digunakan untuk konsumsi makanan, berarti sebagian besar dari penduduk masih memprioritaskan pemenuhan untuk kebutuhan primer (makanan), yaitu sebesar 63,80 persen.

Tabel 7.1. Pengeluaran/Kapita/Bulan dan Persentase Pengeluaran/Kapita/Bulan Penduduk Kabupaten Karo, 2016-2021

TAHUN	PENGELUARAN/KAPITA/BULAN			% PENGELUARAN/KAPITA/BULAN		
	Makanan	Bukan Makanan	JUMLAH	Makanan	Bukan Makanan	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	617 920	388 489	1 006 410	61,40	38,60	100,00
2017	701 333	362 710	1 064 042	65,91	34,09	100,00
2018	797 509	479 008	1 276 517	62,48	37,52	100,00
2019	816 054	506 668	1 322 722	61,70	38,30	100,00
2020	808 453	555 739	1 364 192	59,26	40,74	100,00
2021	883 498	501.286	1 384 784	63,80	36,20	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2016 - 2021

BAB 8

PERUMAHAN



58,02

persen penduduk Kabupaten Karo
mendiami **rumah milik sendiri**

87,31

persen rumah tangga Kabupaten Karo
memiliki **fasilitas buang air besar sendiri**

8 Perumahan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 yang mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman menjadi tugas bagi negara yang penyelenggaraan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

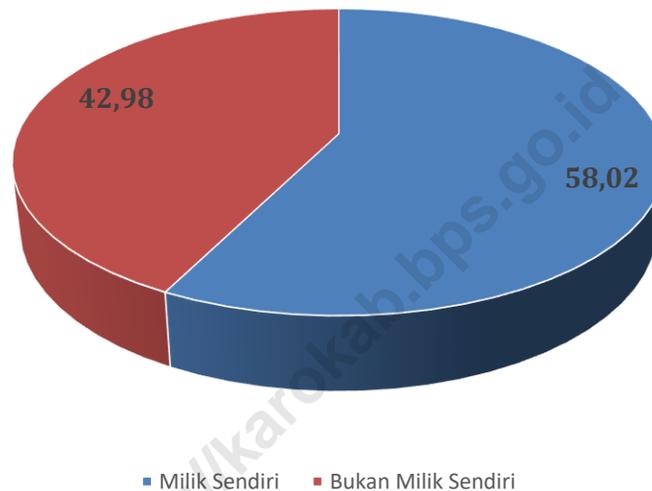
Manusia dan lingkungannya baik fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik dapat berupa alam sekitar yang alamiah dan juga buatan. Untuk melindungi diri dari kondisi alam, manusia berusaha membuat tempat perlindungan yang dikenal dengan rumah atau tempat tinggal. Oleh sebab itu selain sandang dan pangan, papan (perumahan) juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Sampai saat ini permintaan rumah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Di pihak lain, terbatasnya lahan untuk permukiman dan penawaran perumahan hanya dapat dijangkau oleh golongan masyarakat tertentu. Hal ini merupakan kendala bagi sebagian besar masyarakat golongan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhannya sehingga menyebabkan banyak rumah tangga menempati rumah yang kurang layak, baik dipandang dari segi kesehatan maupun kepadatan penghuninya.

Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, yaitu ditentukan oleh fasilitas rumah yang ada. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut di antaranya terlihat dari luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan lainnya. Demikian pula letaknya yang mudah untuk menjangkau fasilitas lingkungan seperti sekolah, tempat berobat, pasar dan tempat rekreasi. Dengan kondisi semacam ini, keadaan perumahan beserta lingkungannya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kondisi Rumah

Salah satu hal yang dapat dijadikan gambaran kondisi kesejahteraan penduduk dari sisi perumahan adalah status kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator perumahan yang menunjukkan penguasaan rumah tangga terhadap rumah yang ditempatinya. Dalam beberapa analisis juga dijadikan sebagai pendekatan indikator *backlog* perumahan.

Gambar 8.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Kabupaten Karo, 2021



Berdasarkan informasi pada gambar 8.1. mayoritas rumah tangga di Kabupaten Karo yakni mencapai dua per tiga atau 58,02 persen mendiami rumah milik sendiri. Status penguasaan tempat tinggal milik sendiri dapat dikatakan rumah tangga tersebut telah mampu memenuhi tempat tinggal yang terjamin. Hal ini dikarenakan tempat tinggal milik sendiri cenderung lebih permanen dalam jangka panjang dibandingkan yang tidak menempati rumah milik sendiri..

Fasilitas Rumah Tinggal

Rumah yang layak tidak hanya dilihat dari kondisinya tapi juga dari ketersediaan fasilitas penunjang perumahan yang utama di antaranya adalah fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB). Fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan oleh rumah tangga dapat mencerminkan tingkat kesehatan rumah beserta lingkungannya. Pada tahun 2021 fasilitas tempat buang air besar sebahagian besar rumah tangga di Kabupaten Karo adalah digunakan oleh ART sendiri (87,31 %) dengan kloset leher angsa (95,11 %).

Tabel 8.1. Kondisi Fasilitas Tempat Buang air Besar di Kabupaten Karo, 2021

Uraian	Persentase
(1)	(4)
1. Rumah tangga yang menggunakan kloset leher angsa (%)	95,11
2. Rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri (%)	87,31

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2021

Rumah tangga cenderung berupaya agar tempat tinggalnya memiliki tempat buang air besar sendiri, dengan alasan kebersihannya lebih terjaga. Tersedianya tempat buang air besar sendiri yang memenuhi syarat kesehatan, akan menjauhkan rumah tangga dari penyebaran penyakit. Oleh karena itu tempat penampungan akhir juga sangat penting bagi kesehatan lingkungan.

Gambar 8.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Karo, 2021



Tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan adalah yang menggunakan tangki septik sehingga limbah manusia tersebut tidak mencemari lingkungan, terutama sumber air minum (pada sumur pompa atau sumur). Pada tahun 2021 tangki septik/IPAL merupakan pilihan terbanyak rumah tangga di Kabupaten Karo yaitu sebesar 82,20 persen. Namun masih terdapat sekitar 17,80 persen rumah tangga dengan tempat penampungan akhir di tempat lainnya seperti lubang tanah, kolam, sawah, sungai/danau/laut.

Tabel 8.2. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama yang Dignakan Untuk Memasak, Mandi, Cuci, dll di Kabupaten Karo, 2021

Sumber Air Minum	Persentase
(1)	(2)
1. Leding	22,81
2. Sumur bor/pompa	31,50
3. Sumur/mata air terlindung	32,80
4. Sumur/ mata air tak terlindung	7,29
5. Lainnya	5,61

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2021

Rumah tangga dikategorikan memiliki akses terhadap air minum bersih apabila sumber untuk air minum berasal dari air kemasan, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan jarak ≥ 10 meter dari penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat.

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Karo tahun 2021 telah menggunakan sumber air leding untuk memasak, mandi, cuci, dll yaitu mencapai 22,81 persen. Sedangkan penggunaan sumur bor/ pompa dan sumur/ mata air terlindung juga masih cukup tinggi yaitu sebesar 31,50 persen dan 32,80 persen, hal ini wajar karena pada sebagian daerah Kabupaten Karo adalah pedesaan yang memiliki banyak sumber mata air, dan juga tidak/belum tersedianya fasilitas air leding.

BAB 9

KEMISKINAN

JUMLAH PENDUDUK MISKIN

38,01 ribu jiwa



PERSENTASE KEMISKINAN

8,79 persen

GARIS KEMISKINAN

Rp. 531.519



9 Kemiskinan

Perkembangan Penduduk Miskin

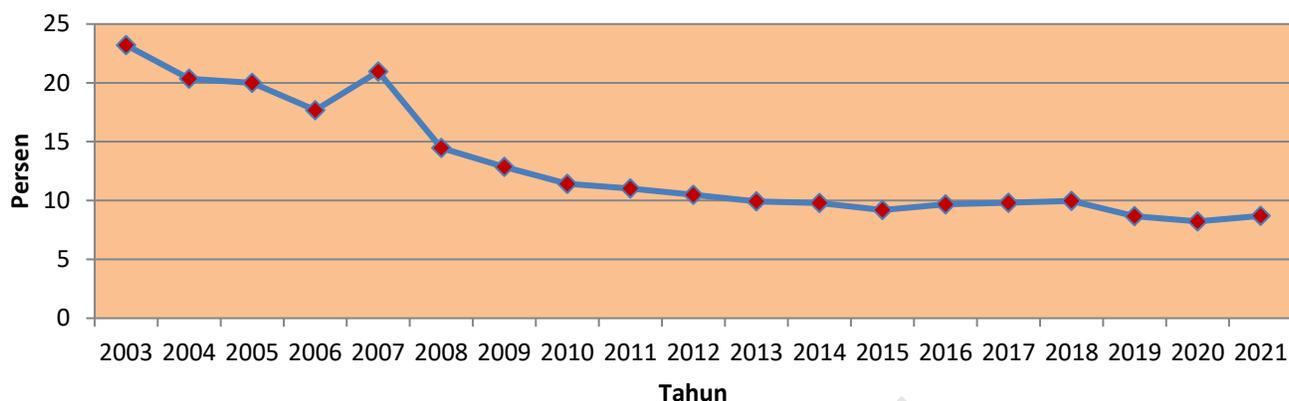
Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, di mana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan ini membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan minimal non-makanan yang harus dipenuhi. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi sebesar 2.100 kilo kalori (kcal) per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan. Patokan 2.100 kilo kalori ditentukan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang menyatakan hidup sehat rata-rata setiap orang harus mengkonsumsi makanan minimal setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karo sebanyak 38,01 ribu jiwa atau sebesar 8,79 persen terhadap total penduduk. Jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada bulan Maret 2020, dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 36,57 ribu jiwa atau sebesar 8,70 persen, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 1,44 ribu jiwa dan peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,09 poin.

Gambar 9.1. Trend Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karo, 2003-2021



Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2020 – Maret 2021, secara umum Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) menunjukkan sedikit penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 1,39 menjadi 1,23. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan dari 0,38 menjadi 0,29 pada periode yang sama. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin kecil.

Tabel 9.1. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Karo, 2020-2021

Uraian	2020	2021
(1)	(2)	(3)
1. Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	36,57	38,01
2. Persentase penduduk miskin (P_0)	8,70	8,79
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	1,39	1,23
4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)	0,38	0,29
5. Garis Kemiskinan (Rupiah)	500 921	531 519

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020-2021

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KARO**

Jl. Jamin Ginting No. 112A, Raya Berastagi - 22152

Telp : (0628) 92675, Fax : (0628) 92851

Homepage : <http://karokab.bps.go.id> E-Mail : bps1211@bps.go.id